

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Moderasi Beragama

1) Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi Beragama secara bahasa di ambil dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti sedang (tidak kurang ataupun lebih) atau dapat di artikan sebagai pengendalian diri dari sikap yang berlebihan (Aziz, 2021). Sedangkan menurut KBBI, Moderasi dapat di artikan menjadi dua yakni meminimalisir kekerasan dan menjauhi keekstreman (Aspila dan Baharuddin 2022). Adapun dalam Bahasa arab kata moderasi di sejajarkan dengan kata "wasath" yang berarti di tengah-tengah (tawasuth), I'tidal, dan Tawazun (berimbang). Sehingga kemudian di serap kedalam Bahasa Indonesia Kembali menjadi kata "wasit" dengan arti, perantara, pelera, dan pemimpin pertandingan. Dan beragama sendiri ialah perilaku aktif meyakini dan berhubungan dengan tuhan dalam bentuk beribadah (Saputra dan Azmi 2022).

Beragama berarti memeluk atau menganut suatu agama. Agama sendiri mencakup arti, sistem, prinsip, dan kepercayaan kepada Tuhan bersama dengan ajaran kebaktian dan tanggung jawab yang terkait dengan kepercayaan itu (KBBI 2020). Di Indonesia ada lima agama yang di akui oleh pemerintah, yakni: Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Secara terminologi beragama berarti menganut atau memeluk agama tertentu. Misalnya, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Beragama dapat didefinisikan juga sebagai beribadat, taat kepada agama, dan menjalani kehidupan yang baik menurut agama. Sebagai contoh, ia berasal dari keluarga yang beragama. Agama berarti sangat memuja-muja, mencintai, atau mementingkan. Sebagai contoh, mereka percaya pada harta benda. Agama dapat di artikan pula dengan kalimat menyebarkan damai dan kasih sayang kepada siapa pun dan kapan pun (Rizky dan Syam 2021). Beragama tidak berarti menyeragamkan

keberagaman, sebaliknya, beragama berarti menerima keberagaman dengan kearifan (Nurdin 2021).

Salah satu definisi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku seseorang yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem. Tentu saja, ada ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah pandangan, sikap, dan perilaku seseorang dalam beragama tertentu tergolong moderat atau ekstrem. Sebenarnya, moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan toleransi dan kerukunan di seluruh dunia, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan peradaban dan perdamaian, setiap manusia yang beragama harus memilih moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme agama. Dengan cara ini, semua agama dapat memperlakukan satu sama lain dengan hormat, menerima perbedaan, dan hidup bersama dalam damai dan harmoni. Moderasi beragama bisa menjadi sebuah program wajib dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia (Mahamid 2023).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama adalah sikap yang memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang tidak ekstrim, baik ke arah liberal maupun radikal. Lukman menekankan bahwa moderasi beragama berarti menerapkan agama secara seimbang sesuai dengan prinsip keadilan, toleransi, dan inklusivitas. Menurut Lukman, ini adalah prinsip penting untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di masyarakat Indonesia yang terdiri dari orang-orang dari berbagai agama dan budaya (Saifuddin, 2019a).

Adapun menurut K.H Hasyim Muzadi, moderasi beragama adalah ajaran agama yang sama sekali tidak berlebihan, baik dalam cara pandang atau bersikap, yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang dan berada di tengah-tengah dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik agama maupun madzhab (Alfiannoor, 2023).

Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi, moderasi merupakan sebuah keseimbangan antara teks, dan konteks (Radiani, 2021). Menurutnya, moderasi tidak boleh cenderung pada konteks situasi atau lingkungan politik dan melampaui teks. Kewenangan adat atau masalah lebih di pilih dan lebih cenderung mengkontekstualisasikan situasi tanpa teks. Dan menurutnya juga, moderat adalah sebuah kata yang berasal dari barat (Anwar, 2023a). Moderat ala barat tidak bisa di artikan seperti *washatiyah* dalam islam. Washatiyah dalam islam dapat di pahami sebagai keutamaan dan keadilan umat yang selalu melakukan kebaikan (Husna, 2021). Sebaliknya moderat ala barat adalah menyetujui segala ideologi pemahaman di dunia seperti *liberalism*, *komunisme* dan lain sebagainya (E. Dewi, 2018).

Menurut Budi Suhartawan, moderasi beragama dalam wawasan Al-Qur'an adalah suatu sikap dasar utama islam dan warga muslim dalam menentukan arah baru bagi masyarakat dalam memahami agama dan membawa perubahan cara pandang yang lebih bernilai dan berimbang (Suhartawan, 2021).

Hadirnya moderasi beragama di sebabkan oleh heterogenitas (keragaman) dalam beragama yang tidak mungkin bisa di hindari (Mahardhani, 2022). Dengan adanya moderasi beragama di harapkan dapat mencari persamaan dan tidak mempertajam perbedaan. Alasan penting lainnya adalah dasar dari hadirnya agama adalah menjaga martabat manusia agar tidak ada pertumpahan darah karena sejatinya agama memiliki misi dan tujuan menebarkan perdamaian dan keselamatan manusia (Sirajuddin, 2020a).

Adapun hadirnya moderasi beragama yang berkembang saat ini sejatinya merupakan slogan untuk memperbaiki Syariah Islam yang sudah sempurna dan sebagai pengingat bahwa Islam sudah toleran sejak awal terhadap agama lain (S. Yusuf et al., 2021). Hal tersebut di tunjukkan dalam Al-Qur'an surat *Al-Kafirun* ayat enam yang berarti “ Untukmu agamamu, dan untukku agamaku” (MZ & Mulkan, 2021).

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa sangat jelas Islam membiarkan umat lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Namun beberapa kalangan ada yang menghormati agama lain secara berlebihan hingga mencampuradukkan agama Islam dengan agama lainnya (Budi, 2022).

Dari hal tersebut kita harus memahami moderasi beragama secara kontekstual dan tekstual. Artinya moderasi beragama di Indonesia bukan berarti Indonesia yang di moderatkan, melainkan cara pemahaman dalam beragama yang harus di moderasikan, karena Indonesia terdiri dari banyaknya budaya, agama, etnis dan lain sebagainya (Fahri & Zainuri, 2019).

Moderasi beragama memiliki relevansi dengan Pancasila dalam upaya meredam radikalisme di Indonesia. Dari relevansi tersebut menghasilkan lima nilai yaitu, tauhid, adil dan moderat, toleransi dan gotong royong, musyawarah serta nasionalisme (M. Dahlan & Asiyah, 2019).

1. Tauhid

Moderasi beragama akan tumbuh dan berkembang, apabila masyarakat dapat menjaga kemurnian tauhid mereka terhadap Tuhan sesuai dengan perintah agama masing-masing (Alimuddin et al., 2023). Hal ini tentu relevan dengan sila pertama dari Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Karena hal tersebut bisa di jadikan sebagai pondasi utama dalam moderasi beragama. Sehingga apabila masyarakat benar-benar memiliki tauhid yang kuat, maka moderasi beragama dapat dilakukan dengan baik. Sejatinnya perintah untuk bermoderasi beragama sudah menjadi perintah agama dari berbagai kitab suci (Syam & Yusuf, 2020).

2. Adil dan Moderat

Adil memiliki makna menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta memenuhi dan menerima hak diikuti dengan menjalankan kewajiban secara proporsional (Amar, 2018).

Adapun moderat dapat diartikan sebagai sikap yang berada di pertengahan dalam menjaga keseimbangan dan mengambil jalan yang terbaik (Nisa et al., 2021). Keseimbangan dalam masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural harus di jaga dengan baik agar radikalisme yang berkembang di masyarakat dapat di redam dengan baik (Primayana & Dewi, 2021).

Sikap adil dan moderat saling berkaitan erat. Karena apabila keadilan tidak dibersamai dengan sikap moderat, di khawatirkan akan timbul kedhaliman (Muchlis, 2020).

3. Toleransi dan Gotong Royong

Toleransi adalah menghargai dan mengakui perbedaan dari aspek keagamaan, sosial, kebudayaan, dan perbedaan-perbedaan lainnya (A. Muslim, 2013). Toleransi harus di terapkan tengah masyarakat, karena Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, dan golongan lainnya (Kaaffah et al., 2022). Penerapan dari toleransi harus di lakukan secara ikhlas dalam menerima segala perbedaan dan tetap teguh terhadap prinsip pada diri sendiri, tanpa harus mengorbankan prinsip tersebut (Alfayyadl & Fachory, 2023). Agama memberikan larangan saling mencela agama lain agar terjaga kesucian dari agama, terjalin hubungan yang harmonis, dan memberi rasa aman terhadap pemeluk agama lain (Khoir & Anshory, 2023).

Adapun gotong royong merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia (Permana & Mursidi, 2020). Secara definitif gotong royong berarti saling mengangkat sesuatu secara bersamaan, dengan kata lain dapat diartikan saling tolong - menolong (Mahfud et al., 2012).

Dalam moderasi beragama, toleransi dan gotong royong memiliki keterkaitan yang erat dan menjadi bagian penting dari moderasi beragama itu sendiri (Lede, 2022). Toleransi mengarah kepada sikap terbuka, sukarela, lapang dada, dan lembut ketika

menerima perbedaan. Sementara gotong royong mengarah kepada kebersamaan, empati, dan saling membantu (Nurfitri, 2017).

Karena hal tersebut maka akan terbangun dan memperkuat rasa persatuan, sehingga masyarakat yang saling menghargai memiliki kepedulian sosial yang merupakan semangat Pancasila (Nurfitri, 2017).

4. Musyawarah

Musyawarah merupakan suatu upaya untuk menyatukan pemahaman dan pendapat dengan tujuan agar mendapatkan jalan keluar dalam menyelesaikan suatu masalah (Widiantara et al., 2023). Dan musyawarah memang harus di pertahankan karena sudah menjadi tuntunan abadi serta kodrat manusia sebagai makhluk sosial (Rizani & Dakhoir, 2020).

5. Nasionalisme

Nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri (Muharrom et al., 2023). Menurut Jalaludin, pengabdian tertinggi seorang kepada negara disebut dengan nasionalisme atau cinta tanah air (Fahrudin, 2020).

Nasionalisme harus ada pada setiap elemen masyarakat Indonesia. Karena negaralah yang menjadi tempat lahir, tempat lahir, interaksi dari masyarakat Indonesia itu sendiri (Irawan, 2020).

Nasionalisme atau cinta tanah air adalah sikap yang harus di terapkan oleh setiap umat beragama di Indonesia (Irawan, 2020). Nasionalisme merupakan komitmen kebangsaan dan pengabdian seseorang terhadap negaranya yang merupakan indikator dari moderasi beragama dan semangat Pancasila (Jasiah et al., 2023a).

2) Sejarah Moderasi Beragama di Indonesia

Sejarah moderasi beragama di Indonesia pada penerapannya sudah terlaksana sejak zaman kerajaan (Sumardi, 2023). Hal ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam dari segi suku, agama, dan budaya sudah melekat pada leluhur bangsa Indonesia (S. Susanto, 2017).

Toleransi dan kerukunan antara agama-agama lokal sudah menjadi hal yang di utamakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit (Zainuri et al., 2022). Sebagai contoh, semboyan Majapahit adalah "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti "berbeda tetapi tetap satu." Penggunaan frasa ini menunjukkan prinsip moderasi dan penghargaan terhadap keragaman, yang merupakan pilar kehidupan sosial (M. F. J. L. Putri & Mubarak, 2023).

Setelahnya, penerapan moderasi mulai dikembangkan lagi oleh agama Islam melalui para pedagang dan ulama dari Arab, India, dan Persia yang membawa Islam ke Nusantara melalui perdagangan dan dakwah (Sugara, 2023). Islamisasi dilakukan dengan cara yang damai, ramah, dan menghormati budaya lokal. Cara tersebut merupakan salah satu bentuk moderasi beragama yang saat ini kita kenal (Bujuri et al., 2023).

Adapun kelompok sembilan ulama yang terkenal dengan sebutan "Walisongo" memainkan peran besar dalam memperkenalkan Islam secara moderat dengan menghormati adat dan budaya setempat (Hannan, 2018). Mereka menyampaikan ajaran Islam dengan menggunakan pendekatan budaya dan tradisi lokal, seperti wayang dan gamelan, yang menjadi salah satu warisan moderasi agama terbesar di Indonesia (Umar, 2021).

Selanjutnya, pada era kolonial Belanda, perbedaan agama sering digunakan oleh penjajah untuk memecah-belah rakyat Indonesia (Habibi, 2018). Meski demikian, para pemimpin agama dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menekankan bahwa persatuan dan toleransi antar-agama sangat penting untuk melawan penjajahan (Azca et al., 2021a).

NU memiliki paham Ahlussunnah wal Jama'ah, yang menekankan keseimbangan dalam beragama, anti-ekstremisme, dan penghormatan terhadap keragaman budaya (Misrawi, 2010). Prinsip-prinsip ini membantu NU membangun sikap moderat terhadap perbedaan pandangan keagamaan. NU menggunakan ASWAJA sebagai panduan dalam melawan kolonial untuk mengembangkan praktik Islam yang sesuai dengan kearifan lokal tanpa harus melawan perubahan secara ekstrem (Hakim, 2020).

NU menentang kolonialisme dengan cara yang damai dan tidak konfrontatif, mereka menunjukkan sikap patriotik terhadapnya (Ismail, 2020). NU mendukung pendidikan dan pembinaan umat, mendidik masyarakat tentang pentingnya perjuangan melalui pendidikan dan kesadaran sosial (Fachruddin, 2006a). (NU) dan organisasi Islam lainnya berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan masyarakat untuk kemerdekaan, ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Mereka melakukannya dengan cara moderat, mengutamakan kerukunan meskipun dalam kondisi sulit (Abdurrahman, 2013) .

Adapun Muhammadiyah, pada masa kolonial menunjukkan sikap moderat melalui pendekatan yang inklusif, edukatif, dan penuh toleransi. Muhammadiyah menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sambil tetap terbuka dan menghargai keberagaman

di Indonesia (Uswatusolihah & Saputro, 2024). Hal tersebut tercermin dengan dakwah yang dilakukan Muhammadiyah melalui pembangunan sekolah, rumah sakit, dan berbagai layanan masyarakat yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat (Muhammadiyah, 2010a).

Selain itu, Muhammadiyah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif sosial untuk membantu orang-orang miskin, anak yatim, dan kaum terpinggirkan. Aktivitas sosial Muhammadiyah selama penjajahan memperkuat solidaritas dan kemandirian umat Islam, yang merupakan bentuk perlawanan yang moderat terhadap kolonialisme (Rogahang & Teol, 2024).

Muhammadiyah menyebarkan pesan bahwa keberagamaan juga harus dilakukan untuk masyarakat melalui aktivitas-aktivitas ini. Hal ini menunjukkan moderasi beragama yang menekankan kepedulian dan kerja sama antarumat beragama untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat (Gobang & Fil, 2024).

Namun, pemerintah Indonesia baru secara resmi menggunakan istilah "moderasi beragama" sekitar tahun 2019 melalui Kementerian Agama sebagai tanggapan terhadap meningkatnya ancaman radikalisme dan intoleransi yang dianggap dapat mengganggu stabilitas nasional dan kerukunan sosial, walaupun penerapannya sudah ada pada zaman dahulu (Sirajuddin, 2020b).

Moderasi beragama menjadi prioritas Kementerian Agama yang diresmikan oleh Lukman Hakim Saifuddin, menteri agama saat itu. Tujuan program ini adalah untuk memupuk sikap beragama yang seimbang, toleran, dan anti-ekstremisme (Rifandi, 2024). Program moderasi beragama ini terus didorong melalui program pendidikan, pelatihan, dan kampanye kesadaran

publik yang tersebar di masyarakat, institusi pendidikan, dan lembaga pemerintah (Raudah, 2021).

3) Indikator Moderasi Beragama

Ada empat indikator dalam moderasi beragama, yaitu (Islamy, 2022):

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan sangat penting untuk digunakan sebagai indikator moderasi beragama. Karena dari sudut pandang moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan memenuhi kewajiban sebagai warga negara (Muliani dkk. 2023).

b. Toleransi

Toleransi dalam moderasi beragama berkaitan dengan toleransi sosial dan politik. Sikap terhadap pemeluk agama lain, kesediaan untuk berbicara, bekerja sama, membangun tempat ibadah, dan pengalaman berinteraksi dengan orang-orang dari agama lain melalui relasi antar agama dan intraagama.

Di sisi lain, toleransi intraagama dapat digunakan untuk menangani kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari norma sosial (Kaaffah dkk. 2022).

c. Anti Kekerasan

Indikator ini bermaksud untuk tidak menggunakan perbedaan sebagai sarana konflik. Sekretaris Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI menuturkan bahwa, "Boleh tidak setuju dengan perbedaan pendapat, tetapi jangan menggunakannya untuk memicu kekerasan (Hamdi, Mukaffa, dan Masrifah 2019).

d. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Perilaku dan praktik agama yang menerima budaya lokal dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi tradisi dan budaya lokal.

Orang-orang yang moderat cenderung menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agamanya. Tradisi keberagaman yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif (Zulkarnain 2023).

4) Prinsip Moderasi Beragama

Ada lima prinsip dalam moderasi beragama, yaitu ; 1) Washatiah, yaitu prinsip dengan sikap tidak ekstrim ke kiri maupun kanan. 2) Tasamuh, moderasi beragama berupaya untuk menjadi penghubung antara perbedaan-perbedaan pemahaman dan sikap moderat, sehingga terbentuk kondisi yang toleran, damai, dan penuh pengertian. 3) Musawah, yaitu prinsip yang mengutamakan kesejajaran dan kesamaan sesama manusia. 4) Adalat, yaitu prinsip yang mengutamakan keseimbangan di antara berbagai paham. 5) Terbuka dan Dinamis, moderasi beragama terbuka terhadap hal baru tanpa menghilangkan identitas jati dirinya (Huriani, Zulaiha, dan Dilawati 2022).

Adapun menurut pandangan Lukman Hakim Saifudin, bahwa moderasi beragama memiliki enam indikator penting, sebagai berikut (Prakosa, 2022a):

a) Keseimbangan dalam Beragama

Moderasi beragama tidak berarti mengurangi keyakinan agama. Sebaliknya, moderasi beragama berarti menerapkan ajaran agama dengan cara yang tenang, bijaksana, dan tidak ekstrem (Heriyanti, 2020). Lukman berpendapat bahwa sikap ekstrem, baik radikalisme maupun liberalisme yang terlalu bebas, dapat mengancam stabilitas sosial. Orang-orang dalam moderasi ini diminta untuk mengamalkan agama secara

proporsional dan menghindari fanatisme yang sempit dan eksklusif (K. Rahman & Noor, 2020).

b) Toleransi Terhadap Perbedaan

Menghargai dan menerima perbedaan dalam kepercayaan agama dan interpretasi agama yang berbeda merupakan salah satu ciri-ciri moderasi beragama (Saumantri & Bisri, 2023). Menurut Lukman toleransi adalah kunci untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Beliau mengajak orang-orang untuk menjunjung tinggi prinsip toleransi dan menghormati hak orang lain (U. Hanifah, 2024).

c) Komitmen Terhadap Nilai Kebangsaan

Lukman berpendapat bahwa nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 selaras dengan moderasi beragama (Cristiana, 2021). Beliau percaya bahwa agama harus membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa daripada memicu perpecahan. Beliau menekankan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI, dan salah satu cara untuk memastikan bahwa perbedaan agama tidak mengancam kesatuan bangsa adalah dengan bertindak dengan moderasi (A. E. Rahayu et al., 2024).

d) Antiekstremisme dan Pencegahan Radikalisme

Lukman melihat moderasi beragama sebagai upaya untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme, yang seringkali muncul dari sikap eksklusif dan intoleran (M. Z. Yusuf & Mutiara, 2022). Beliau percaya bahwa memberikan pendidikan moderasi beragama sejak dini dapat membangun karakter masyarakat yang lebih

terbuka dan bijaksana (Haryani, 2020). Selain itu, menurut beliau melalui program-program Kementerian Agama moderasi beragama dapat mendorong orang untuk menghindari gagasan dan tindakan yang dapat merusak persatuan dan merusak citra agama yang damai (Ramdhani et al., 2022a).

e) Pentingnya Dialog dan Pendidikan Moderasi Beragama

Lukman mengusulkan bahwa pendidikan moderasi beragama harus disebarluaskan ke berbagai lembaga pendidikan dan keagamaan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moderasi (Setia & Imron, 2021a). Selain itu dialog antarumat beragama dan mazhab juga dianggap penting sebagai cara untuk saling memahami dan mengurangi kemungkinan konflik (Madiyono & Haq, 2023a). Menurut beliau dialog terbuka dan saling menghormati akan memperkuat nilai-nilai moderasi dalam masyarakat, mengurangi kemungkinan salah paham, dan membangun solidaritas (Lubis, 2024).

f) Peran Pemerintah dalam Mendorong Moderasi Beragama

Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan moderasi beragama dengan menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung keharmonisan beragama (Azka, 2024). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama moderat melalui program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama (Mukhibat et al., 2023). Dengan melibatkan tokoh agama, guru, pemuka masyarakat, dan generasi muda, Program Moderasi Beragama

dimulai pada 2019 dengan tujuan menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, keseimbangan, dan cinta damai dapat terlaksana dengan baik (M. F. Rahman, 2022).

B. Radikalisme Agama dan Resolusinya

1. Pengertian Radikalisme

Secara etimologis, kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu kata *radix* yang artinya akar. Selain itu, dalam bahasa Inggris, kata radikal sering dikaitkan dengan sikap yang ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, dan fundamental. Istilah radikal sendiri populer digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal (Botma 2020). Sedangkan radikalisme bermakna praktik dan doktrin penganut paham radikal yang berorientasi ekstrim. Radikalisme juga bisa dipahami sebagai paham (isme) atau tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim (Mulyandari 2022).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme dapat didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Pada umumnya, radikalisme berasal dari paham ekstrem yang disebabkan oleh ketidakpuasan dengan situasi tertentu (Nihayaty dan Rohmy 2020). Menurut Affandi, banyaknya gerakan radikalisme atau kemunculan kelompok-kelompok yang dituduh sebagai teroris akhir-akhir ini dianggap sebagai respons atas kegagalan untuk menjelaskan berbagai krisis masyarakat modern oleh paham modernisme, liberalisme, dan demokrasi (Afandi 2016).

Nasution menjelaskan bahwa radikalisme adalah gerakan yang memiliki pandangan konservatif, kuno, dan sering menggunakan kekerasan untuk menyebarkan kepercayaan mereka (Nasution 2018).

Sartono Kartodirdjo mendefinisikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menentang sistem sosial yang ada, dan ditandai dengan ekspresi moral yang kuat untuk bermusuhan dan menentang kaum yang memiliki hak istimewa dan kuasa (Tahir dan Tahir 2020).

Dalam teori Galtung, radikalisme dan terorisme yang muncul dari aspek kultur (sikap) dan struktur (pemikiran). Dari teori ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari sikap intoleran dapat berevolusi menjadi sikap radikalisme yang lambat laun menjadikannya teroris (Azca et al., 2021b).

Adapun John L. Esposito mengatakan radikalisme adalah pandangan atau sikap yang menekankan perubahan cepat dan mendalam terhadap sistem sosial atau politik yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai (Turmudi & Sihbudi, 2005a). Esposito menyoroti fakta bahwa radikalisme biasanya berfokus pada perubahan fundamental dan seringkali dilakukan dengan cara konfrontatif atau ekstrem, terutama dalam kasus di mana individu atau kelompok merasa tidak ada cara lain untuk mencapai tujuan mereka (Usman et al., 2014). Dalam konteks radikalisme agama, Esposito juga mengatakan bahwa perasaan ketidakadilan atau marginalisasi seringkali memicu radikalisme, mendorong individu atau kelompok untuk menentang sistem atau otoritas yang ada (Rantung, 2019a).

Selanjutnya, menurut Walter Laqueur, radikalisme didefinisikan sebagai ideologi atau tindakan yang menggunakan cara-cara ekstrim untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks politik dan sosial (Nursalim, 2014). Laqueur memandang radikalisme sebagai bentuk reaksi kuat terhadap tatanan yang ada, di mana individu atau kelompok yang menganut paham ini cenderung menolak kompromi dan lebih memilih pendekatan drastis untuk mencapai perubahan (Atmaja et al., 2023). Laqueur juga menemukan bahwa radikalisme sering dikaitkan dengan

ketidakpuasan mendalam terhadap situasi politik atau sosial yang dianggap tidak adil, yang mengarah pada tindakan yang seringkali revolusioner atau bahkan destruktif (Meliala, 2023).

Sedangkan Anthony Giddens menggambarkan radikalisme sebagai upaya untuk melakukan perubahan besar dalam struktur sosial melalui tindakan yang cepat dan seringkali ekstrem (Meliala, 2023). Menurut Giddens, radikalisme muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi sosial atau politik yang ada, di mana individu atau kelompok merasa perlu untuk mengubah sistem secara menyeluruh (Khamdan, 2022b). Selain itu, Giddens menekankan bahwa modernisasi dan globalisasi adalah situasi di mana radikalisme sering muncul. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diuntungkan oleh perkembangan tersebut dapat menunjukkan reaksi ekstrim (E. Susanto, 2007a).

Adapun Mark Juergensmeyer menjelaskan radikalisme sebagai keinginan kuat untuk mengembalikan ajaran atau nilai-nilai yang dianggap asli oleh keyakinan agama tertentu (Nurulita, 2021). Juergensmeyer mengamati bahwa radikalisme agama sering muncul sebagai tanggapan terhadap perasaan ketidakadilan atau degradasi moral dalam masyarakat. Tujuan dari radikalisme ini adalah untuk memperbaiki situasi yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama (Abdurrohman & Syamsiar, 2017a).

2. Faktor dan Karakteristik Radikalisme

Menurut Azyumardi Azra, faktor-faktor berikut berdampak pada peningkatan radikalisme di kalangan umat Islam :

- a. Pemahaman keagamaan yang parsial terhadap teks agama. Memahami teks tanpa memahami konteksnya dapat menyebabkan salah interpretasi. Misalnya, ayat yang menjelaskan situasi perang, dipahami secara umum dan digunakan di luar konteks yang dimaksud.

- b. Bacaan yang salah tentang sejarah Islam dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa lalu. Pandangan puritanisme, yang berpusat pada salafi wahabi yang muncul di semenanjung Arabia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pemurnian Islam dari berbagai praktik yang dianggap bid'ah adalah tema utama kelompok ini, yang seringkali menggunakan kekerasan.
- c. Deprivasi ekonomi, politik, dan sosial masih ada di masyarakat. Selain itu, akses globalisasi, dislokasi dan disorientasi sosial budaya menjadi faktor penting lainnya yang mendorong munculnya kelompok radikal. Tidak jarang, kelompok sempalan tersebut berubah menjadi kultus (cult) yang sangat eksklusif, tertutup, dan berpusat pada seseorang yang dianggap kharismatik.
- d. Konflik sosial bernuansa agama dan intraagama masih berlanjut. Ada sejumlah alasan untuk hal ini. Pertama, reformasi terkait dengan *euphoria* kebebasan, di mana setiap individu atau kelompok merasa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keinginan mereka tanpa peduli dengan pihak lain. Kedua, fragmentasi politik dan sosial terus berlanjut, terutama di kalangan elit politik, sosial, dan militer, terus berdampak pada lapisan bawah masyarakat dan menyebabkan konflik yang tidak jelas dan luas (Azra 2016).

Selanjutnya, Yusuf al-Qardhawi menguraikan karakteristik pemahaman radikal sebagai berikut :

- a. Mereka sering mengklaim kebenaran tunggal dan menggunakannya untuk menyesatkan orang lain yang tidak setuju dengan pemikirannya.
- b. Radikalisme membuat agama Islam yang seolah gampang menjadi lebih sulit dengan menyatakan bahwa ibadah sunnah dianggap wajib dan ibadah makruh dianggap haram.

Selanjutnya, mereka hanya memprioritaskan masalah sekunder dan mengabaikan masalah primer.

- c. Sebagian besar kelompok radikal sangat fanatik terhadap agama yang tidak berkaitan dengan lazimnya. Hal ini sangat bertentangan dengan cara dakwah Nabi.
- d. Dalam interaksi sosial, mereka cenderung berbicara dengan kasar, berbicara dengan keras, dan berdakwah dengan emosional.
- e. Kelompok radikal sangat mudah untuk berburuk sangka terhadap orang yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Sebagian besar dari mereka melihat orang lain hanya dari sisi negatifnya, melupakan sisi positifnya. Selanjutnya, mereka sering tanpa percaya bahwa mereka bebas dari semua dosa dan menganggap orang lain sebagai sesat dan ahli bid'ah.
- f. Orang yang terpapar radikalisme mudah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat (Awadin dan Witro 2023).

Secara umum, radikalisme dapat digambarkan dengan empat ciri: Pertama, ketidaktoleranan, di mana seseorang tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, fanatisme, di mana seseorang selalu merasa benar dan menganggap orang lain salah. Ketiga, eksklusivitas, di mana seseorang membedakan diri dari kebiasaan umum. Keempat, sikap revolusioner, yang cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan (Akhkam, 2023).

Adapun faktor yang menjadi sebab munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia ada dua. *Pertama*, ada faktor internal di kalangan umat Islam sendiri, di mana terjadi penyimpangan dari aturan agama. *Kedua*, faktor eksternal datang dari luar umat Islam, seperti gerakan Warsidi, Salaman hafidz, dan Imron, atau komando Jihad, yang telah memicu radikalisme di Indonesia (Hafid, 2020a).

Sebenarnya, jihad menjadi simbol perlawanan yang berguna untuk memulai perang melawan Barat. Ini adalah keadaan yang menyebabkan konflik yang terus menerus antara Islam dan Barat (Mawaddah, 2024). Keadaan yang terjadi di Indonesia saat umat Islam menanggapi serangan AS di Afghanistan adalah contohnya. Dalam periode ini, agama Islam menemukan kesempatan untuk menyuarakan keinginan mereka, yang dikenal sebagai Solidaritas Islam. Oleh karena itu, kelompok Islam radikal seperti KISDI, Laskar Jihad, FPI, Ikhwanul Muslimin, dan Mujahidin bergerak untuk menentang penyerangan AS. Bahkan, komandan jihad juga dikirim ke Afghanistan dalam upaya tersebut (Zada, 2002a).

Di sisi lain, aktivitas terorisme di Indonesia saat ini telah menurun sejak awal tahun 2000-an (Khoiriyah, 2019). Sayangnya, radikalisme agama, sumber utama terorisme, masih berkembang dan memperoleh tempat di beberapa elemen masyarakat (Jahroni, 2016). Selain radikalisme agama, gesekan-gesekan lain, seperti separatisme dan anti persatuan, masih berpotensi memicu aksi teror. Akibatnya, kekebalan harus selalu mengingat bahwa kita hidup di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman. Jika kita tidak bersikap tenggang rasa dan terbuka, radikalisme dapat masuk dengan mudah dan berdampak pada kita (Alansyah et al., 2022). Untuk melindungi negara dari ancaman radikalisme yang memanfaatkan celah-celah ketidakadilan, pemerintah juga harus menjadi lokomotif dalam pembangunan persatuan dan kesejahteraan nasional (H. A. Muhammad, 2024).

Anas Saidi, seorang peneliti dari LIPI, mengatakan bahwa proses Islamisasi yang dilakukan di kalangan remaja ini berlangsung secara tertutup dan cenderung tidak terbuka kepada orang lain yang beragama Islam, terutama mereka yang

memiliki keyakinan yang berbeda (Rizky et al., 2019). Dia menegaskan bahwa jika pemahaman ini dibiarkan, bangsa akan hancur karena orang akan menganggap ideologi Pancasila tidak lagi penting (Soedarsono, 2013).

Adapun dalam penelitian lainnya, radikalisme terjadi karena dua faktor. *Pertama*, warisan sejarah umat Islam yang berselisih dengan rezim, karena ada cara-cara penindasan politik Islam yang terjadi di beberapa bagian sejarah, terutama selama Orde Baru (Rantung, 2019b). Kelompok yang termarginalkan secara historis ini, sadar akan sejarah mereka, mereka berusaha mengembalikan posisi politik Islam dengan cara-cara nonnegara dan struktural. Ada kesadaran untuk mengembalikan otoritas politik Islam karena marginalisasi politik Islam oleh hegemoni politik internasional, yaitu AS. Gerakan politik Islam dan transnasionalisme membawa kesadaran ini ke Indonesia (Muhaimin, 2020).

Kedua, fenomena ekonomi-politik.. Menurut argumen ini, eksekutif kapitalisme menyebabkan radikalisme, yang menghasilkan orang-orang yang tidak memiliki akses ke sumber-sumber modal (Mulyono & Mulyoto, 2017). Pendekatan ekonomi-politik ini disebut sebagai "pendekatan kelas". Dengan kata lain, reaksi terhadap radikalisme pada dasarnya adalah reaksi kelas terhadap hegemoni oligarkis kapital atas negara (Mudhoffir et al., 2023).

Radikalisme sering menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk kekerasan. Melalui penyebaran narasi-narasi kekerasan yang menukil aspek agama dari berbagai sudut pandang dan seringkali bertentangan dengan arti sebenarnya, pelaku menyebarkan dan menanamkan doktrin ini ke masyarakat. Narasi yang telah tersebar ini kemudian berkembang menjadi kepercayaan yang mendorong masyarakat untuk bersikap intoleran

dan bahkan bertindak kekerasan jika dengan iming-iming perintah Tuhan (Widyaningsih 2019).

Perubahan sosial yang demikian cepat dan keras termasuk radikalisme agama. Di sisi lain, sekularisasi dan rasionalisme telah menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk ditolak oleh umat beragama. Ada konflik kepentingan antara dua hal yang saling bertentangan yang akhirnya menghasilkan pilihan hidup alternatif (Iffan et al., 2020). Seorang teolog Jerman bernama Olaf Schumann menggambarkan radikalisme agama sebagai bentuk ekspresi keagamaan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk mempertahankan keyakinan agamanya dan kemudian mengikuti keyakinan keagamaan seperti yang ditulis dalam kitab suci (Sarluf, 2019). Jenis keyakinan ini adalah jenis radikal yang baik dan harus dianut oleh semua pemeluk agama. Namun, radikalisme dalam arti negatif, seperti menuduh orang lain tidak beradab, kurang beriman, kurang benar dalam agama, dan tidak akan mendapatkan keselamatan, harus dihilangkan (Anwar, 2023b).

Radikalisme agama hanya berlaku di dalam agama sehingga bersifat intrinsik, bukan di luar agama sehingga beranggapan bahwa orang lain tidak memiliki hak agama (Rakhmat, 2021). Sebaliknya, radikalisme yang baru-baru ini muncul di Indonesia sebagai negara yang sangat religius adalah jenis radikalisme yang dianggap negatif, karena itu harus dihapus segera agar tercipta kaum beragama yang santun, saling mengasihi, saling membantu, dan toleran, daripada menghakimi orang lain dengan keyakinan yang dibangun di atas dasar teologi (pemahaman keagamaan) dari abad pertengahan 14-15 M atau abad ke-7 dan 8 H (M. T. Rahman, 2020).

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat dipahami bahwa radikalisme agama adalah praktik keagamaan yang menginginkan transformasi besar-besaran dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu (Setia & Imron, 2021a).

Kemunculan kelompok radikal di kalangan umat Islam Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Radikalisme muslim diambil alih oleh kelompok Serikat Islam (SI) pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari semangat dan ekonomi yang meningkat di kalangan penduduk asli (Asrori, 2015). Tidak seperti di Timur Tengah yang sangat menekankan agenda politik, gerakan radikalisme di Indonesia berbeda dengan hal itu (Prasetio, 2020).

Radikalisme adalah fakta sosial yang mencakup mikro, lokal, makro, dan meso (Kusmanto et al., 2015). Kajian tentang radikalisme lebih memperhatikan proses radikalisasi akibatnya. Hal ini bertujuan untuk menemukan elemen yang mendorong seseorang atau kelompok untuk bertindak radikal. Mereka percaya bahwa keyakinan, latar belakang pendidikan, dan keadaan sosial dan ekonomi adalah beberapa faktor yang membentuk proses radikalisasi (Setia & Imron, 2021b).

Selain itu, tindakan radikal sering dianggap sebagai pilihan yang masuk akal bagi sekelompok orang. Tindakan radikal melibatkan mobilisasi sumber daya dan kesempatan politik yang dibingkai dengan kerangka agama (M. A. Dewi et al., 2023).

Kajian radikalisme sering memperhatikan hubungan antara radikalisme dan agama. Dimensi agama selalu menjadi dasar tindakan radikal (Adiwilaga & Kurniawan, 2021). Contohnya Jihadisme selalu dikaitkan dengan radikalisme Islam. Radikalisme dilihat sebagai keyakinan agama pada aspek yang paling nampak dari kehidupan manusia (Harmony, 2017). Mengatasinya menjadi sulit karena pandangan tersebut, keyakinan adalah aspek kehidupan manusia yang sangat sulit untuk diubah (Nikijuluw, 2001).

3. Dampak dari Radikalisme

Radikalisme dapat memiliki efek yang beragam, baik positif maupun negatif, tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum, efeknya lebih sering bersifat negatif karena melibatkan upaya mendalam untuk perubahan yang dapat menyebabkan ketegangan sosial, ketidakstabilan, dan bahkan kekerasan. Berikut adalah efek utama radikalisme (Zainuri, 2020):

a) Polarisasi Sosial

Radikalisme sering menyebabkan polarisasi yang tajam dalam masyarakat, di mana kelompok yang memiliki pandangan ekstrem mengalienasi diri dari kelompok lain yang memiliki keyakinan atau nilai yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara berbagai kelompok yang berasal dari agama, budaya, politik, atau etnis (Wildan, 2013).

Dalam teori konflik oleh Karl Max, sebagai tanggapan terhadap ketidakadilan sosial, kelompok yang terpinggirkan atau tidak diuntungkan dapat menjadi lebih radikal. Ketika kelompok yang terradikalisasi ini berseberangan dengan kelompok lain, polarisasi sosial terjadi, yang menghasilkan ketegangan dan konflik yang semakin tajam (Z. Maliki, 2018).

Adapun dalam teori identitas sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel dan John Turner menyatakan bahwa individu dapat menentukan identitas mereka berdasarkan kelompok sosial mereka. Radikalisasi seringkali merusak pembentukan kelompok yang lebih eksklusif dengan memanfaatkan perasaan "kita vs. mereka". Ketika perbedaan identitas antar kelompok meningkat, polarisasi sosial dapat

terjadi, menyebabkan konflik dan ketegangan antara kelompok tersebut (Istiyanto & Novianti, 2018).

Sedangkan menurut Emile Durkheim dalam teori *anomie*, menyatakan bahwa *anomie* dapat menyebabkan orang merasa terisolasi atau tidak memiliki tujuan yang jelas. Akibatnya, mereka mungkin mencari kelompok atau identitas yang lebih ekstrem sebagai tanggapan atas ketidakpastian atau ketidakpuasan mereka, yang pada gilirannya menyebabkan polarisasi sosial menjadi lebih buruk (Khotimah et al., 2023).

b) Konflik dan Kekerasan

Meningkatnya konflik dan kekerasan adalah salah satu efek paling nyata dari radikalisme. Untuk mencapai tujuan mereka, kelompok radikal sering menggunakan taktik kekerasan, seperti terorisme, pemberontakan, atau serangan terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai "musuh", yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan properti, dan ketidakamanan yang meluas (Reksoprodjo et al., 2018b).

Dalam teori konflik Karl Max, kelompok yang tertindas atau teralienasi dapat berusaha untuk menggulingkan struktur kekuasaan yang ada, yang seringkali melibatkan kekerasan, jika mereka menanggapi ketidakadilan dan ketimpangan, yang kemudian dapat menyebabkan konflik dan kekerasan (Muslikhati, 2004).

Sedangkan dalam teori kekuasaan dan konflik sosial dari Max Webber menuturkan bahwa dalam banyak kasus radikalisisasi dikaitkan dengan transformasi sosial yang signifikan atau melawan sistem kekuasaan yang

dianggap tidak sah. Kelompok radikal mungkin menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka jika mereka percaya bahwa pendekatan damai tidak dapat mengubah situasi (S. F. Dewi & Sos, 2017).

Adapun dalam teori kolonialisme dan radikalisme, Frantz Fanon menjelaskan bahwa bagaimana ketidakadilan sosial dan proses kolonisasi dapat memicu radikalisme. Fanon menyatakan dalam "The Wretched of the Earth" bahwa radikalisme dalam masyarakat kolonial sering mengarah pada konflik dan kekerasan sebagai bentuk perjuangan untuk kebebasan dan keadilan. Menurut Fanon, kekerasan adalah cara yang sah untuk melawan penindasan (T. Suharto, 2012).

Selanjutnya dalam teori globalisasi dan radikalisme, David Held menggambarkan bagaimana ketimpangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh globalisasi dapat meningkatkan radikalisme, yang pada tahap selanjutnya dapat menyebabkan konflik dan kekerasan (Purwanto, 2015).

c) Instabilitas Politik

Sikap ekstremisme politik kiri maupun kanan dapat membahayakan stabilitas politik suatu negara. Kelompok radikal sering menuntut perubahan besar dalam ideologi atau pemerintahan saat ini, yang dapat menyebabkan kerusuhan, revolusi, atau bahkan revolusi. Radikalisme politik dapat memperburuk krisis politik dan menambah ketidakpastian jika tidak ditangani dengan hati-hati (Zada, 2002b).

Dalam teori konflik Karl Max menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di antara

kelas-kelas masyarakat dapat menyebabkan ketegangan yang kuat. Karena ketidakadilan ini, radikalisme sering terjadi, dan konflik yang muncul dapat mengganggu stabilitas politik. Instabilitas politik dapat terjadi sebagai hasil dari ketegangan antara kelompok yang merasa tertindas dan kelompok yang berkuasa, terutama dalam kasus gerakan radikal yang bertujuan untuk menggulingkan atau menggantikan sistem kekuasaan yang ada (Raya et al., 2024).

Selanjutnya adalah teori frustrasi dan agresi dari John Dollard menyatakan bahwa rasa frustrasi yang dirasakan oleh individu atau kelompok karena tidak dapat mencapai tujuan mereka dapat memicu agresi, yang kadang-kadang dapat menyebabkan radikalisme. Ketika suatu kelompok percaya bahwa kanal politik dan sosial yang sah tidak berfungsi, mereka mungkin beralih ke tindakan radikal yang dapat mengganggu stabilitas politik negara atau pemerintahan. Jika kelompok-kelompok ini dihapus, itu dapat menyebabkan ketegangan politik yang luas dan instabilitas (Firdaus, 2022).

Sedangkan menurut Durkheim, anomie dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dalam konteks radikalisme, anomie dapat terjadi ketika individu atau kelompok merasa kehilangan orientasi atau arah dalam masyarakat. Ketidakpastian ini dapat mendorong radikalisme dan tindakan yang merusak stabilitas politik, karena individu atau kelompok mungkin tidak lagi merasa terikat dengan sistem politik (Hisyam et al., 2024).

Adapun Huntington, dalam karya terkenal "The Clash of Civilizations," berpendapat bahwa perbedaan budaya dan agama dapat memperburuk konflik antar negara dan kelompok. Radikalisasi dalam konteks ini dapat terjadi ketika kelompok-kelompok tertentu berupaya untuk memperjuangkan nilai-nilai mereka yang berbeda dengan cara yang ekstrem, yang dapat menciptakan ketegangan internasional dan instabilitas politik, baik di tingkat domestik maupun global (Zulaiha et al., 2024).

Sedangkan dalam teori perubahan sosial Charles Tilly menyatakan bahwa konflik sosial dan kekerasan dapat muncul sebagai akibat dari perubahan sosial dan politik yang cepat dan tidak terkendali. Salah satu reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap keadaan saat ini adalah radikalisasi. Ini dapat menyebabkan ketegangan politik dan instabilitas ketika kelompok radikal menantang pemerintah atau mencoba mengubah sistem politik yang ada (Rochadi, 2020).

d) Ancaman Terhadap Toleransi dan Kerukunan Sosial

Radikalisme terutama yang berkaitan dengan agama atau budaya, dapat merusak kerukunan sosial dan toleransi dalam komunitas multikultural. Kebersamaan budaya, agama, atau pandangan hidup yang berbeda sering direndahkan atau ditolak oleh kelompok radikal yang mengejar dominasi prinsip-prinsip mereka. Ini menyebabkan perbedaan pendapat, diskriminasi, dan bahkan kekerasan berbasis identitas (Sutiah & Pd, 2020).

Karl Marx dalam teori konflik sosialnya menekankan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial

menyebabkan ketegangan dan konflik di masyarakat. Meskipun dia tidak secara eksplisit membahas radikalisme, pemahamannya tentang konflik kelas dapat digunakan untuk memahami bagaimana ketidakadilan dapat mendorong kelompok tertentu menuju radikalisme sebagai cara untuk memperjuangkan perubahan. Seringkali, radikalisme muncul sebagai tanggapan terhadap ketimpangan struktural, yang dapat membahayakan toleransi karena polarisasi kelompok sosial (Ranuwijaya & Rujikartawi, 2020).

Adapun Anthony D. Smith melakukan penelitian tentang bagaimana identitas kelompok, terutama identitas agama dan etnis, dapat membentuk loyalitas yang kuat dan eksklusif. Sehingga Smith menemukan teori identitas, yang didalamnya menyatakan bahwa ancaman atau diskriminasi terhadap identitas kelompok menyebabkan radikalisme. Hal ini dapat menyebabkan reaksi ekstrem yang dapat mengganggu kerukunan sosial, terutama dalam kasus di mana suatu kelompok meradikalisasi identitasnya untuk mempertahankan "keaslian" kelompoknya dan melawan ancaman dari luar (D. Setiawan & Dharma, 2021).

Sedangkan Juergensmeyer melakukan penelitian tentang ciri-ciri fundamentalisme agama dan mengaitkannya dengan kecenderungan radikal. Menurutnya, keinginan untuk mempertahankan prinsip keagamaan atau ideologis di tengah dunia yang semakin multikultural dan sekuler seringkali menjadi dasar radikalisme. Kelompok-kelompok yang lebih fundamental mungkin menolak pluralisme dan

toleransi, menyebabkan konflik dengan kelompok lain (Faruki, 2019).

Selanjutnya, Olivier Roy menekankan bahwa marginalisasi dan alienasi sering menyebabkan radikalisasi, terutama di kalangan remaja. Radikalisasi adalah cara untuk menyatakan ketidakpuasan atau mencari identitas baru, terutama bagi mereka yang merasa terpinggirkan secara sosial atau ekonomi. Pertumbuhan radikalisasi dalam kelompok dapat menimbulkan ancaman bagi kerukunan sosial karena identitas radikal seringkali bertentangan dengan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi (Khamdan, 2022a).

Selanjutnya, dalam teori kognitif sosial, Bandura menyatakan bahwa pengamatan dan interaksi sosial adalah cara yang paling umum untuk mempelajari perilaku radikal. Dalam konteks radikalisme, teori ini mengatakan bahwa lingkungan sosial yang mendukung ideologi radikal dapat mendorong orang untuk berpikir secara ekstrem. Jika kelompok atau masyarakat tertentu terus terpapar pandangan ekstrem yang tidak toleran, ini dapat memicu perilaku radikal yang merugikan kerukunan sosial (D. J. Siswanto et al., 2022).

e) Terorisme dan Ekstrimisme

Terorisme atau ekstremisme seringkali dikaitkan dengan radikalisme. Terorisme atau ekstremisme terjadi ketika kelompok yang memegang keyakinan yang ekstrem atau absolut melakukan aksi teror untuk menyebarkan pesan atau mencapai tujuan tertentu. Seperti yang terlihat dalam banyak kasus terorisme global, ini menimbulkan ketakutan di masyarakat dan

dapat merusak hubungan internasional (Widyaningsih, 2019).

Dalam bukunya “Why Men Rebel”, Ted Gurr mengemukakan teori deprivasi relatif. Menurut teori ini, radikalisme dan kekerasan, termasuk terorisme, sering muncul ketika kelompok atau individu merasa tidak mendapatkan hak mereka. Ketika harapan mereka tentang kesejahteraan atau keadilan sosial tidak terpenuhi, mereka dapat menggunakan cara-cara radikal untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Teori ini berpendapat bahwa deprivasi relatif dapat mendorong orang menjadi ekstremis dan akhirnya melakukan tindakan teroris (Novi & Hardi, 2023b).

Selanjutnya, Robert K. Merton mengatakan bahwa radikalisme dan ekstremisme dapat muncul sebagai tanggapan atas hambatan struktural yang menghalangi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama. Teori ini disebut sebagai teori strain. Orang mungkin beralih ke metode radikal atau kekerasan ketika mereka merasa terjebak dalam struktur sosial yang menghalangi mereka untuk mencapai tujuan secara legal. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengarah pada terorisme (U. Huda & Haryanto, 2018).

Sedangkan dalam teori pembelajaran sosialnya, Albert Bandura mengatakan bahwa pengamatan, interaksi sosial, dan pemodelan perilaku dapat digunakan untuk mempelajari perilaku ekstrem dan radikal. Dalam konteks radikalisme, individu yang terpapar ideologi ekstremis dari komunitas atau media tertentu dapat meniru perilaku ekstrem ini. Ketika orang mulai melihat kekerasan sebagai solusi yang diterima,

pembelajaran sosial yang mendorong radikalisme dapat memicu tindakan terorisme (Setiadi & Syauqillah, 2023).

Adapun menurut teori tindakan kolektif Charles Tilly upaya kolektif untuk mencapai tujuan politik tertentu seringkali mengarah pada kekerasan dan ekstremisme. Terorisme dapat digunakan oleh kelompok radikal sebagai cara untuk memobilisasi pengikut atau untuk menarik perhatian pada agenda mereka. Terorisme dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan politik atau perubahan struktural yang diinginkan dalam konteks ini (Santoso, 2015).

f) Kehancuran Ekonomi

Radikalisme dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh konflik atau kekerasan mengganggu aktivitas ekonomi, merusak infrastruktur, menghentikan investasi, dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang. Indikator ekonomi seperti lapangan kerja, kualitas hidup, dan GDP sering turun di negara-negara yang dilanda radikalisme (Santoso, 2015).

Menurut teori kesenjangan struktural, atau strain theory, dari Robert K. Merton, ketika struktur sosial menghalangi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan ekonomi, mereka mungkin mengambil tindakan radikal atau ilegal,. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, terutama jika tindakan ekstrim seperti kerusuhan atau penghancuran properti memengaruhi bisnis dan investasi. Investor kehilangan kepercayaan dan produksi terhambat dapat

menyebabkan kemerosotan lingkungan ekonomi (Fairuzzen et al., 2024).

Sedangkan menurut teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank, negara-negara berkembang sering terjebak dalam ketergantungan ekonomi terhadap negara maju. Negara-negara yang merasa dirugikan oleh sistem ekonomi global saat ini dapat mengembangkan radikalisme. Jika kelompok radikal di negara-negara berkembang menanggapi ketergantungan ini dengan tindakan ekstrim seperti nasionalisasi industri atau pemutusan hubungan dagang, hal itu dapat berdampak buruk pada ekonomi lokal. Karena kehilangan investasi asing dan kerusakan hubungan internasional, kebijakan radikal ini sering menyebabkan kehancuran ekonomi (Sasongko, 2006).

Selanjutnya, Hirschman menjelaskan bahwa ketidakstabilan politik dapat berdampak langsung pada ekonomi. Radikalisme politik, seperti demonstrasi massal atau konflik bersenjata, dapat merusak infrastruktur, menghambat perdagangan, dan mengurangi daya tarik ekonomi sebuah negara. Meningkatnya radikalisme dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi yang berkepanjangan (Tadjoeddin et al., 2017).

Adapun Krueger mempelajari hubungan antara terorisme dan ekonomi, beliau menemukan bahwa terorisme yang dipicu oleh radikalisme dapat berdampak besar pada ekonomi, terutama dalam hal perdagangan, pariwisata, dan investasi. Ancaman terorisme menurunkan kepercayaan di pasar, menyebabkan biaya keamanan yang lebih tinggi, dan

menurunkan produktivitas. Ketidakamanan yang menghambat aktivitas ekonomi dapat menyebabkan krisis ekonomi di negara-negara yang dilanda konflik radikal dan terorisme (Djelantik et al., 2013).

g) Pengaruh Negatif Terhadap Generasi Muda

Generasi muda yang rentan untuk bergabung dalam gerakan ekstrem yang menawarkan rasa identitas, tujuan, dan solidaritas, sehingga radikalisme seringkali menargetkan mereka, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi mereka untuk berkembang dalam masyarakat yang damai dan produktif serta akibatnya dapat terjadi peningkatan jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan kekerasan (Hariyati & Septiana, 2019).

Menurut Erik Erikson, masa remaja adalah fase penting dalam pembentukan identitas. Anak muda sering kali rentan terhadap pengaruh luar, termasuk ideologi radikal, saat identitas mereka belum lengkap. Karena mereka tidak yakin dan mencari makna dalam hidup, mereka tertarik pada ideologi atau kelompok yang menawarkan identitas dan tujuan yang kuat. Mereka dapat mengembangkan sikap intoleran jika terpengaruh oleh radikalisme, yang menghambat pertumbuhan identitas yang adil (Wibowo, 2020).

Sedangkan menurut Emile Durkheim, orang yang merasa terasing dari masyarakat atau tidak memiliki ikatan sosial yang kuat lebih rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk radikalisme. Generasi muda yang merasa diabaikan atau terpinggirkan dari norma-norma sosial cenderung mencari identitas dan keterikatan melalui kelompok radikal. Hal ini dapat berdampak buruk pada mereka karena radikalisme menyebabkan

perbedaan dan isolasi sosial, yang dapat mengarah pada tindakan ekstrem (Ali, 2020).

h) Meningkatnya Intoleransi

Rasa tidak toleran terhadap kelompok lain dapat diperburuk oleh diskriminasi agama atau budaya. Kelompok radikal mungkin percaya bahwa pandangan mereka satu-satunya yang benar, dan bahwa pandangan lain dianggap sebagai ancaman atau salah. Hal ini dapat meningkatkan polarisasi, ketidakpercayaan, dan kebencian antar kelompok di seluruh dunia (Shofan, 2011a).

Menurut teori konflik realistik Muzafer Sherif, konflik antar kelompok terjadi ketika kelompok bersaing untuk mendapatkan sumber daya terbatas, seperti kekuasaan, status, atau ekonomi. Konsep bahwa kelompok lain menantang kepentingan kelompok mereka sendiri sering menyebabkan konflik ini. Karena ketegangan dan persaingan yang meningkat ini, kelompok-kelompok mulai melihat satu sama lain dengan permusuhan dan ketidakpercayaan. Ini menyebabkan sikap intoleran (Sumartias & Rahmat, 2013).

i) Reaksi Berlebihan dan Represi

Dalam beberapa situasi, radikalisme dapat memicu tindakan pemerintah atau pihak berwenang yang berlebihan, yang dapat menghasilkan kebijakan represif seperti pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berpendapat, atau penindasan oposisi. Situasi dapat menjadi lebih buruk dan kelompok tertentu menjadi lebih tidak puas (Maarif et al., 2010).

Lewis A. Coser mengatakan bahwa konflik dapat menyebabkan reaksi yang semakin keras, membentuk apa yang disebut spiral konflik. Represi yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah saat munculnya radikalisme dapat dianggap sebagai penindasan yang dilakukan oleh kelompok yang lebih ekstrim. Karena kelompok radikal semakin merasa terancam, mereka seringkali memperkuat perlawanan mereka (Rofiah, 2016).

j) Kerusakan Sosial dan Psikologis

Radikalisasi, terutama yang melibatkan kekerasan atau pertempuran, dapat merusak struktur sosial dan menyebabkan trauma psikologis bagi individu yang terlibat. Korban kekerasan, keluarga mereka, dan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas radikal semuanya termasuk dalam kategori ini. Mereka memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam jangka panjang, mengganggu proses pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat (James, 2023).

Herbert Kelman mengatakan bahwa dehumanisasi memungkinkan kelompok radikal melakukan kekerasan atau intoleransi terhadap kelompok lain karena mereka menganggap mereka tidak manusiawi. Dehumanisasi menyebabkan kerusakan sosial karena kelompok-kelompok masyarakat tidak lagi saling menghargai atau solidaritas. Karena kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami, individu mungkin mengalami trauma, ketakutan, dan kebencian yang berkelanjutan. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental mereka (Imran et al., 2023).

k) Penurunan Kerja Sama Internasional

Radikalisme, terutama terorisme, dapat mengganggu hubungan internasional dan mendorong negara untuk lebih waspada atau bahkan melakukan intervensi militer. Jika diplomatik terganggu, itu dapat menyebabkan ketegangan antara negara atau blok internasional berkembang (Hari Purwanto, 2021).

Pemikir seperti Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz memperkenalkan teori realisme, yang menyatakan bahwa kepentingan nasional dan keamanan adalah dasar operasi suatu negara. Negara atau wilayah sering melihat radikalisme sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara lain. Hal ini menyebabkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antarnegara, yang pada gilirannya menghambat kerja sama internasional. Sebaliknya, negara-negara menjadi lebih tertutup dan defensif terhadap radikalisme, yang mengurangi kerja sama di bidang keamanan, perdagangan, dan sosial (Nugroho, 2022).

4. Upaya Pencegahan Radikalisme

Ada dua resolusi yang dapat diambil untuk mencegah radikalisme:

a. Memiliki Nilai Moderasi

Pertama, Tawassut (Jalan Tengah), memiliki cara berpikir yang tidak ekstrim dan liberal dalam memahami agama, ideologi, dan aspek lain dari kehidupan. Kedua, I'tidal, yang berarti proporsional dan bertanggung jawab atas penyelesaian konflik, serta membela hak asasi kaum minoritas lebih daripada kelompok mayoritas. Ketiga, Tasamuh, mengakui dan menghargai perbedaan yang ada di setiap aspek kehidupan. Keempat, Syuro, adalah proses penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman yang sama. Kelima, Qudwah,

adalah menjadi manusia cerdas, inovatif, dan mampu menggunakan teknologi untuk mensejahterakan manusia. Dengan kata lain, tindakan yang berasal dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan prinsip agama, budaya, kemanusiaan, dan konservasi alam dan lingkungan yang ramah. Keenam, Muwatanah berarti menghormati hak dan kewajiban warga negara, mengakui NKRI sebagai negara yang berdaulat, dan menghormati Pancasila dan UUD 1945.

b. Memilliki Nilai Kearifan Lokal

Kearifan lokal sebagai warisan nasional bisa menjadi resolusi penyelesaian konflik agama, khususnya radikalisme (Jufri, 2021). Menurut Haba ada lima Nilai Kearifan Lokal untuk resolusi konflik, khususnya radikalisme sebagai berikut (Indriani & Sahid, 2018) :

1. Kearifan lokal menunjukkan dan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya cinta damai, yang dimiliki oleh semua suku, kelompok, dan agama.
2. Kearifan lokal memiliki aspek kohesif, yang berarti mereka memiliki alat untuk menyatukan bangsa dari berbagai agama, budaya, dan kepercayaan.
3. Kearifan lokal menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan konflik daripada hukum positif yang cenderung memaksa.
4. Kearifan lokal mendorong untuk belajar hidup bersama, menerima perbedaan antar semua golongan, dan bekerja sama untuk membangun bangsa. Kearifan lokal berisi nilai-nilai yang mendorong penerapan budaya yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, politik, sosial, dan agama .(Amaliyah dkk. 2019).

Adapun upaya lainnya menurut Dody S Truna, salah satu cara untuk mencegah radikalisme adalah dengan membangun narasi yang berbeda tentang radikalisme yang telah dipelajari melalui pendidikan multikultural (Mubarok & Bakri, 2021). Banks juga memberikan empat perspektifnya tentang cara mencegah radikalisme yakni, kontribusi, mata pelajaran tambahan, transformasi, dan aksi sosial (Lesmana et al., 2023).

Dalam kaitannya dengan pendapat Banks di atas, hal ini dapat dicapai dengan memfokuskan perhatian pada karakteristik budaya yang mencegah budaya tertentu dari sikap radikalisme (Arifian, 2019). Dalam hal ini, mata pelajaran tertentu sangat tepat untuk ditambahkan dalam upaya mencegah radikalisme dengan memasukkan materi yang berkaitan dengan budaya dan etnik tanpa mengubahnya (Futaqi, 2023). Karena itu, upaya pencegahan dengan pendekatan transformatif mungkin dapat dicapai dengan membuat rencana pembelajaran yang mencakup ide dan masalah budaya etnik yang sedang berkembang. Terakhir, menggunakan pendekatan aksi sosial yang nyata yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencegah sikap radikalisme di lingkungan sekitar (Sulfemi, 2019).

Upaya untuk mencegah radikalisme harus dimulai dengan diri sendiri dan kemudian berlanjut ke keluarga, komunitas sekitar, dan masyarakat umum (Dei Hattu, 2022). Sangat penting untuk menghentikan radikalisme dengan melibatkan peran perempuan. Ini mencakup mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pergaulan sosial, mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan struktural di masyarakat, mencapai pemerataan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong mereka, dan mendukung advokasi

hukum, sosial, dan ideologi yang diradikalisasi (Zainal & Hamdani, 2018).

Adapun di lingkungan pendidikan, radikalisme harus dicegah sejak dini agar tidak menjadi bibit terorisme di masa mendatang. Ini dapat dicapai melalui penguatan kurikulum, penguatan budaya religius, dan kegiatan intra-, kokurikuler, dan ekstrakurikuler (A. Rohman, 2020).

